

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, serta dorongan orang untuk melakukan perjalanan¹. Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor lain di dalam negara penerima wisatawan. Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dengan baik dan maksimal akan mampu menarik wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk datang dan membelanjakan uangnya dalam kegiatan berwisata. Dari transaksi itulah masyarakat daerah wisata akan terangkat taraf hidupnya serta negara akan mendapat devisa dari wisatawan asing yang menukar mata uang negaranya dengan rupiah.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dapat diketahui bahwa pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan

¹ Muhammad guntar, 2013. *Pengaruh bauran produk museum terhadap keputusan berkunjung wisatawan di museum jawa tengah ranggawarsita*

bangsa, mempererat persahabatan antarbangsa.² Peningkatan daya saing pariwisata dipandang sebagai langkah strategis untuk memperbesar pangsa pasar wisatawan dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi wisata nasional. Daya saing sangat menentukan sejauh mana kemampuan produk wisata menembus dan meraih posisi puncak di dalam persaingan pasar wisatawan global yang semakin ketat. Setiap Negara mempunyai destinasi wisata yang dituntut untuk mampu menunjukkan posisi daya saing yang unggul agar dapat memudahkan kegiatan promosi dan pemasaran yang lebih efektif di pasar global.

Pariwisata juga berperan besar dalam memberikan sumbangan bagi pendapatan suatu daerah maupun masyarakat. Antara lain adalah; a) menjadikan kelompok masyarakat lokal sebagai sumber tenaga kerja utama di daerah tujuan wisata; b) menjadikan masyarakat lokal sebagai pemasok barang dan jasa pariwisata; c) memberikan insentif kepada masyarakat lokal untuk menjual barang dan jasa wisata secara langsung kepada wisatawan; d) mendorong masyarakat menjadi pemilik dan pelaku usaha jasa pariwisata; e) melakukan investasi infrastruktur pariwisata yang memungkinkan masyarakat lokal memperoleh keuntungan; f) mempekerjakan tenaga kerja lokal di dalam usaha wisata dengan cara memberikan pelatihan; g) mendorong munculnya entitas-entitas kelembagaan baru yang mewadahi kepentingan masyarakat lokal; h) mengoptimalkan potensi-potensi lokal sebagai ganti kegiatan karitas

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

dalam pembangunan pariwisata. Rekomendasi yang dipaparkan di atas pasti belum bisa dijalankan.³

⁴Berbicara mengenai pariwisata, Provinsi Banten secara geografis berada di bagian paling barat pulau Jawa dan berdekatan langsung dengan pulau sumatera. Provinsi Banten memiliki luas 8.800,83 km, diidentifikasi atas 204 Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang tersebar di seluruh wilayah. Sebanyak 71 ODTW (34,8%) merupakan kawasan wisata yang berkembang baik dalam skala nasional maupun internasional. Sementara itu, sekitar 100 ODTW (49,0%) merupakan Obyek wisata yang potensial untuk dikembangkan.

Lebih jauh menelisik dunia kepariwisataan di Provinsi Banten, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten, sektor pengembangan produk pariwisata yang potensial salah satunya ialah pengembangan wisata religi, Jenis wisata ini mulai berkembang dikarenakan sifatnya yang *eco-friendly* dan juga tekanan hidup yang luar biasa membuat orang cenderung mencari aktifitas/kegiatan yang dapat memberikan keheningan dan ketenangan bathin.⁵ Kawasan Banten lama adalah satu contoh dari sebagian obyek wisata religi yang potensial untuk dikembangkan.

Hal ini terbukti dengan tercatatnya 4 juta wisatawan dalam satu tahun, dengan sekian banyak pengunjung yang datang setiap tahunnya tentu

³ Janianton Damanik, *Pariwisata Indonesia antara peluang dan tantangan*, 2013, hlm 14

⁴ Dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi banten, 2010

⁵Ahsana mustika ati, *pengelolaan wisata religi*. 2011

akan sangat berpengaruh dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar obyek destinasi wisata.⁶

Namun sampai saat ini seluruh kawasan wisata religi yang ada di Provinsi Banten tidak di kelola secara keseluruhan baik itu oleh pemerintah maupun pengelola. Selain itu, pemerintah daerah belum memiliki regulasi yang efektif. Sejak 1990 hingga kini, belum ada peraturan daerah yang menyentuh langsung serta efektif, baik dari segi penyusunan maupun implementasi. Hal ini juga termasuk salah satu penyumbang kompleksitas pengelolaan wisata religi yang ada di Provinsi Banten⁷

Sinergi tiga pilar manajemen kepariwisataan, yakni Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan masyarakat, merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan perkembangan sektor kepariwisataan di daerah⁸, untuk itu penting nya regulasi dan kesadaran dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di sektor pariwisata khususnya wisata religi. Sektor wisata religi memerlukan suatu rumusan regulasi dan strategi dengan pola pengembangan kepariwisataan yang terencana atau tersusun agar potensi yang di miliki bisa di kembangkan secara optimal. Di dalam memajukan sektor pariwisata ditingkat daerah peran pemerintah daerah adalah sebagai motor penggerak yang selanjutnya memberikan kewenangan penuh kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Provinsi Banten dalam menentukan strategi-strategi pembangunan kepariwisataan.

⁶ Firman Fajar Saputra, 2014. *Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Wisata Banten Lama Sebagai Wisata Religi*

⁷Kabar banten, 2013

⁸ Janianton Damanik, Pariwisata Indonesia antara peluang dan tantangan, 2013, hlm 20

Penelitian ini nantinya akan membahas mengenai Pengembangan Wisata Religi di Provinsi Banten dan menarik bagi penulis untuk dikaji. Berdasarkan persoalan yang telah ditemukan, penulis mencoba mengkaji dengan judul: **“Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten Dalam Pengembangan Wisata Religi Tahun 2014”**.

1.2 Rumusan Masalah

Atas latar belakang di atas, maka penelitian ini mempunyai perumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dalam pengembangan wisata religi tahun 2014 ?
- 1.2.2 Apakah dampak positif dan negatif pengembangan wisata religi di Provinsi Banten tahun 2014 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin di dapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah dalam pengembangan wisata religi di Provinsi Banten
- 1.3.2 Untuk mengetahui dampak positif dan negatif pengembangan wisata religi di Provinsi Banten

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan di harapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat memberikan manfaat bagi jurusan ilmu pemerintahan untuk memberikan referensi dalam pengkajian analisis kebijakan pariwisata
Dapat menjadi bahan rujukan dan referensi untuk penelitian-penelitian yang relevan di masa yang akan datang

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberi masukan bermanfaat bagi instansi terkait khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

1.5 Kerangka Dasar Teori

1.5.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah *What ever government choose, to do or not to do* artinya apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini adalah negara. Pengertian ini selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuwan yang berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan (*decision making*), dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik.⁹

Menurut Anderson (1975) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang di bangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah sebagai berikut : (1) tindakan yang berorientasi pada tujuan (2) kebijakan publik berisi tindakan tindakan pemerintah (3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan apa yang dimaksudkan untuk dilakukan (4) kebijakan Publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan

⁹ Thomas R. Dye, *Introducing Public Policy* hlm 1

pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu (5) kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa. Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil dari evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

Sedangkan menurut William Dunn (1990) tahap-tahap pembuatan kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah.

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Legitimasi kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan sia-sia apabila tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi Pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya manusia dan finansial. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing, beberapa mendapat

dukungan para pelaksana dan beberapa yang lain mungkin menentanginya.

5. Evaluasi kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Hal terpenting dalam suatu kebijakan publik adalah proses implementasi dari kebijakan publik itu sendiri. Terdapat beberapa proses implementasi kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan diformulasikan dengan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
- b. Keluaran kebijakan merupakan tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan yang akan dicapai untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
- c. Pelaksana/implementer merupakan bagian penting dalam implementasi dari suatu kebijakan, apabila tidak ada pelaksana

maka kebijakan yang telah dibuat tidak akan sampai pada tujuan dan sasaran.

- d. Kelompok sasaran merupakan sasaran pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat, karena terdapat permasalahan yang timbul sehingga membuat munculnya suatu kebijakan.
- e. Dampak dari kebijakan, dalam hal ini dampak dari suatu kebijakan ada yang bersifat dampak langsung, dampak jangka menengah dan dampak jangka panjang.
- f. Kinerja implementasi merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan, baik itu kebijakan berhasil dilaksanakan dengan baik atau sebaliknya.¹⁰

Tahap selanjutnya dalam kebijakan publik yang terpenting adalah proses analisis kebijakan. Menurut William Dunn, analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan di dalam proses kebijakan. Maka metode analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah, yaitu :

1. Definisi : Menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan

¹⁰Erwan Agus Purwanto, dkk, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hlm 72

2. Prediksi : Menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan di masa mendatang
3. Prekripsi : Menyediakan informasi mengenai nilai dari konsekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang
4. Deskripsi : Menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan
5. Evaluasi : kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.¹¹

Analisis kebijakan pada dasarnya adalah teknologi yang ditemukan oleh umat manusia untuk menyelesaikan masalah tentang bagaimana pengambilan keputusan memastikan bahwa kebijakan dibuatnya benar-benar tepat, sebagaimana yang di kemukakan Quade (1992), bahwa analisis kebijakan diperlukan karena banyak perumusan kebijakan yang tidak memuaskan. Di Indonesia kebijakan pemerintah salah satunya di jabarkan dalam peraturan perundang-undangan baik dalam tingkat nasional dan tingkat daerah

1.5.2 Pariwisata

a) Definisi pariwisata

Secara Etomooigi pariwisata berasal dari dua kata yaitu “pari” yang berarti banyak/berkeliling, sedangkan pengertian wisata berarti “pergi”. Didalam kamus besar indonesia pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan

¹¹ Riant nugroho, Public Policy, 2014, hlm 266

rekreasi. Sedangkan pengertian secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Banyak negara yang mengandalkan pendapatan pada sektor pariwisata karena industri pajak merupakan sumber pajak dan pendapatan. Adapun wisata menurut definisi internasional sebagai berikut :

1. Visitor atau pengunjung adalah seseorang yang melakukan perjalanan kesuatu negara yang bukan tempat negara yang mereka tinggal, karena suatu alasan yang bukan pekerjaannya sehari-hari.
2. Tourist atau wisatawan adalah pengunjung yang tinggal sementara disuatu tempat paling sedikit 24 jam di negara yang dikunjungi dengan motivasi perjalanannya yang berhubungan dengan berlibur, berdagang, kunjungan keluarga, misi dan pertemuan-pertemuan.
3. Excursionist (pelancong) adalah pengunjung sementara di suatu negara tanpa menginap.

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh organisasi pariwisata dunia.

Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan, dll. Dan juga menawarkan tempat istirahat, budaya, pelarian, petualangan, dan pengalaman baru dan berbeda lainnya.

Kepariwisataan adalah keseluruhan proses kegiatan yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah dan keterkaitannya satu dengan lainnya dalam mengembangkan pariwisata yang didasarkan dan memperhatikan nilai-nilai agama, pelestarian sumber daya alam dan budaya, kepentingan politik, ekonomi, sosial serta pertahanan keamanan. Untuk itu, pembangunan kepariwisataan Indonesia

tetap menempatkan kebhinekaan, sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Banyak negara, bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh Organisasi Non-Pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal.

Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksudkan dengan pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

b) Wisata Religi

Wisata religi adalah jenis wisata yang terkait dengan perintah agama dan wajib pula mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama Berdasar perspektif pariwisata secara universal, Dalam World Tourism Organisation (WTO) yang menyatakan Pariwisata adalah Aktifitas perjalanan ziarah dan

¹² Sedarmayanti, 2014, membangun dan mengembangkan kebudayaan dan industry pariwisata, hlm16

wisata religi dapat dimasukkan ke dalam definisi pariwisata karena baik peziarah, perjalanan spiritual, maupun perjalanan religi melibatkan keputusan untuk melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya dengan niat bukan untuk tinggal menetap.¹³

1.6 Definisi Konseptual

1.6.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu hal yang dilakukan maupun suatu hal yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini adalah negara. Pengertian ini selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuwan yang berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Kebijakan publik dapat diklasifikasikan sebagai keputusan (decision making), dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan public

1.6.2 Pariwisata

Secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

¹³Rendi redone, 2015, Strategi pengembangan produk kawasan wisata gunung tidar

1.7 Definisi Operasional

1.7.1 Analisis Kebijakan

a. Penyusunan Kebijakan

Penyusunan kebijakan adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah.

b. Wisata Religi dalam Perda No 09 tahun 2015 tentang rencana induk pengembangan pariwisata provinsi Banten

1. Aspek Pengembangan Keruangan atau Kewilayahan

Pengembangan pariwisata di provinsi banten dalam hal ini mengacu pada aspek pengembangan keruangan dan kewilayahan lebih terfokus kepada pengembangan sarana dan prasarana pariwisata untuk menunjang

2. Aspek Pengembangan Pasar dan Pemasaran

Pengembangan pariwisata di provinsi banten dalam hal ini mengacu pada aspek pengembangan pasar dan pemasaran lebih terfokus kepada pengembangan sistem informasi pemasaran

c. Evaluasi kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

1.7.2 Dampak Positif dan Negaif pengembangan wisata religi

a. Pemerintah

Dalam hal ini peran dan kedudukan Pemerintah provinsi Banten melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara langsung maupun tidak langsung akan mendapatkan dampak dari penerapan kebijakan Perda No. 09 tahun 2005. Peneliti akan menjelaskan mengenai dampak positif dan negative bagi pemerintah sesuai dengan fakta yang didapatkan dilapangan.

b. Masyarakat

Masyarakat Provinsi Banten dengan adanya objek wisata religi secara langsung maupun tidak langsung akan mendapatkan dampak dari penerapan kebijakan Perda No. 09 tahun 2005. Peneliti akan menjelaskan mengenai dampak positif dan negative bagi masyarakat Provinsi Banten sesuai dengan fakta yang didapatkan dilapangan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang dapat digambarkan secara sistematis mengenai suatu keadaan, situasi dan fenomena yang telah terjadi. Dengan kata lain deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan suatu keadaan, situasi, kondisi dan analisis mengenai kebijakan Provinsi Banten dalam pengembangan wisata religi tahun 2014.

1.8.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.

1.8.3 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

a) Data primer

Data yang di peroleh secara langsung dari hasil penelitian, dimana data tersebut diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini melalui hasil wawancara dan observasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.

b) Data sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu menggunakan studi pustaka, mengumpulkan buku, arsip dan dokumntasi lainnya dari instansi yang bersangkutan untuk dijadikan sumber data dalam penelitian ini.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara ada;ah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau melakukan Tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan wawancara kepada pejabat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kebijakan mengenai wisata religi

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, arsip dan laporan-laporan lain yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dalam pengembangan wisata religi, sehingga dapat dijadikan sumber data pada penelitian ini.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif yaitu dimana bentuk analisis yang dilakukan dengan menggambarkan dan menganalisa data untuk dapat memberikan informasi dan dapat memberikan pemahaman terkait pokok permasalahan secara rinci dan sistematis. Analisis kualitatif akan diperoleh data kualitatif melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi

Adapun tahap-tahap teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a) Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data

dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi.

b) Penyajian data

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Penyajian data ini mengacu pada perumusan masalah narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab permasalahan yang ada.

c) Pengambilan kesimpulan

Pengambilan atau penarikan kesimpulan merupakan proses menganalisis dan menggabungkan informasi-informasi yang telah terorganisir secara terperinci untuk dapat dijadikan menjadi kesimpulan dengan tetap mengacu pada pokok permasalahan penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini dapat mempermudah proses pengambilan dan penarikan kesimpulan sehingga dapat menjawab pokok permasalahan penelitian dan mencapai tujuan penelitian secara baik dan benar.